

DESENTRALISASI KEKUASAAN DAN KEBERLANJUTAN PERADABAN: STUDI HISTORIOGRAFIS ATAS DINASTI-DINASTI ISLAM TIMUR

Azzahra Sindhi Latifa¹, Hamim Sirojuddin Al Manshur², Fina Thazha Eka Sari³, Arifah Nur Imamma⁴, Aginra Falah Istiqomah⁵, Hakiman⁶

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

e-mail: zaraslatifa@gmail.com

ABSTRAK

Periode pasca-kejayaan Abbasiyah sering diposisikan sebagai fase kemunduran akibat meredupnya otoritas politik di Baghdad. Perspektif tersebut belum sepenuhnya menjelaskan dinamika di kawasan Timur yang justru menunjukkan perkembangan signifikan dalam berbagai bidang. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran desentralisasi kekuasaan sebagai mekanisme transformasi yang menopang keberlanjutan peradaban Islam pada periode tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis *historiographical-critical* terhadap berbagai sumber akademik mutakhir. Fokus kajian diarahkan pada dinamika dinasti-dinasti regional di kawasan Timur yang berkontribusi dalam perubahan struktur politik, intelektual, dan kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melemahnya pusat kekuasaan tidak mengakibatkan stagnasi, melainkan mendorong lahirnya pusat-pusat baru yang aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan praktik keagamaan. Desentralisasi memungkinkan terbentuknya keseimbangan antara otoritas politik dan legitimasi religius, sekaligus memperluas jaringan keilmuan melalui patronase lokal dan adaptasi budaya. Temuan ini menegaskan bahwa periode pasca-Abbasiyah lebih tepat dipahami sebagai fase *adaptive transformation* yang ditandai oleh restrukturisasi kekuasaan, diversifikasi pusat peradaban, dan integrasi sosial-budaya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat perspektif *resilience* dalam historiografi Islam yang menekankan kesinambungan, bukan kemunduran.

Kata Kunci: *Pasca-Abbasiyah, Desentralisasi, Dinasti Regional, Transformasi Politik, Peradaban Islam Timur*

ABSTRACT

The post-Abbasid period is often framed as a phase of decline due to the weakening of political authority in Baghdad. However, this perspective does not fully capture the dynamics in the eastern regions, which in fact experienced significant developments across various domains. This study aims to examine the role of political decentralization as a transformative mechanism that sustained the continuity of Islamic civilization during this period. It employs a qualitative approach based on library research, utilizing a *historiographical-critical* analysis of recent academic sources. The focus is placed on the dynamics of regional dynasties in the eastern Islamic world that contributed to changes in political, intellectual, and cultural structures. The findings indicate that the decline of central authority did not lead to stagnation, but instead facilitated the emergence of new centers that were active in advancing knowledge, economic activity, and religious life. Decentralization enabled a balance between political authority and religious legitimacy, while also expanding intellectual networks through local patronage and cultural adaptation. These findings suggest that the post-Abbasid period is more appropriately understood as a phase of *adaptive transformation*, characterized by the restructuring of power, diversification of civilizational centers, and socio-cultural integration. Accordingly, this study contributes to strengthening a *resilience* perspective in Islamic historiography, emphasizing continuity rather than decline.

Keywords: *Post-Abbasid Period, Decentralization, Regional Dynasties, Political Transformation, Eastern Islamic Civilization*

PENDAHULUAN

Periode pasca-kejayaan Abbasiyah selama ini kerap direpresentasikan sebagai fase kemunduran dalam lintasan sejarah Islam, terutama karena merosotnya otoritas politik terpusat di Baghdad. Cara pandang tersebut berakar pada tradisi historiografi klasik yang menjadikan stabilitas kekuasaan sebagai parameter utama dalam menilai kemajuan peradaban. Namun demikian, perspektif ini menyederhanakan realitas historis yang kompleks karena mengabaikan dinamika yang berkembang di wilayah-wilayah non-pusat kekhalifahan. Sejumlah kajian mutakhir justru mengindikasikan bahwa melemahnya pusat kekuasaan membuka peluang terbentuknya konfigurasi sosial-politik yang lebih adaptif dan kontekstual (Zamzam & Alawi, 2024; Sarifudin et al., 2024; Wulandari et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi melalui pendekatan historiografi kontemporer yang tidak hanya berfokus pada pusat kekuasaan, tetapi juga mengakomodasi dinamika kawasan secara lebih komprehensif.

Di wilayah Timur dunia Islam, khususnya kawasan Khurasan dan Transoxiana, perubahan pasca-Abbasiyah tidak sekadar mencerminkan gejala periferalisasi, melainkan menunjukkan transformasi struktural yang signifikan. Kawasan ini berkembang menjadi simpul baru aktivitas ekonomi, kebudayaan, dan keilmuan yang relatif otonom dari pusat kekhalifahan. Dinasti-dinasti lokal memainkan peran strategis dalam mengelola kekuasaan secara mandiri tanpa sepenuhnya melepaskan legitimasi simbolik dari Abbasiyah. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa fragmentasi kekuasaan tidak selalu berimplikasi pada disintegrasi peradaban, melainkan dapat berfungsi sebagai mekanisme pertumbuhan alternatif dalam sistem sosial-politik (Al Farouqy, 2021; Fitriani et al., 2024; Fauzan & Setiawan, 2022). Dengan demikian, diperlukan kerangka analisis yang mampu menjelaskan hubungan antara desentralisasi politik dan dinamika keberlanjutan peradaban secara lebih sistematis.

Kemunculan berbagai dinasti regional seperti Tahiriyah, Saffariyah, Samanid, Buwaihiyyah, Ghaznawiyah, dan Salajiyah memperlihatkan adanya keragaman strategi dalam mempertahankan stabilitas serta legitimasi kekuasaan. Setiap entitas politik tersebut mengembangkan pendekatan yang berbeda, baik melalui penguatan birokrasi, ekspansi militer, maupun konsolidasi kultural. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan Islam pada periode tersebut tidak lagi bersifat monolitik, melainkan tersebar dalam jaringan otoritas yang saling berinteraksi. Dalam perspektif teori desentralisasi dan transformasi politik, distribusi kekuasaan semacam ini dapat meningkatkan kapasitas adaptasi sistem terhadap kompleksitas sosial dan geografis (*adaptive governance*) (Istaurina, 2025; Usman & bin Abdullah, 2025). Hal ini sekaligus menegaskan fleksibilitas politik Islam dalam merespons perubahan struktural yang terjadi.

Selain dimensi politik, perubahan signifikan juga tampak pada perkembangan intelektual yang tidak lagi terpusat di Baghdad sebagai episentrum keilmuan. Aktivitas ilmiah mulai menyebar ke berbagai kota di kawasan Timur yang memperoleh dukungan dari patronase penguasa lokal. Pola ini melahirkan ekosistem keilmuan yang lebih terdistribusi dan beragam, sehingga memperluas jaringan produksi pengetahuan dalam dunia Islam. Dalam kerangka teori jaringan intelektual (*intellectual network*), penyebaran pusat-pusat keilmuan ini justru memperkuat ketahanan tradisi ilmiah karena tidak bergantung pada satu pusat dominan (Amin, 2024; Elvan et al., 2024; Mudzakkir et al., 2024). Dengan demikian, keberlanjutan intelektual Islam dapat dipahami sebagai hasil dari interkoneksi antar wilayah yang dinamis.

Transformasi pada periode ini juga mencakup proses integrasi antara nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal yang berkembang di berbagai wilayah. Adaptasi tersebut memungkinkan

ajaran Islam berinteraksi dengan konteks sosial-budaya setempat tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Interaksi ini menghasilkan bentuk ekspresi peradaban yang lebih beragam dan kontekstual, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun pendidikan. Dalam perspektif teori akulturasi (*cultural acculturation*), proses ini menunjukkan bahwa peradaban Islam memiliki kapasitas integratif yang tinggi dalam menghadapi pluralitas budaya (Prasetyo, 2023; Saidina, 2025). Oleh karena itu, perubahan yang terjadi tidak dapat semata-mata dipahami sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika keberlanjutan peradaban.

Meskipun sejumlah studi telah membahas dinamika pasca-Abbasiyah, masih terdapat kesenjangan yang cukup jelas dalam kajian yang secara khusus menempatkan desentralisasi sebagai mekanisme utama dalam menjaga keberlanjutan peradaban Islam di kawasan Timur. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada narasi kemunduran politik atau konflik kekuasaan tanpa mengaitkannya dengan transformasi struktural yang lebih luas. Selain itu, dominasi kajian mengenai faktor eksternal seperti invasi Mongol sering kali mengaburkan pemahaman terhadap dinamika internal yang telah berlangsung sebelumnya (Ansori, 2022; Basri et al., 2024). Dengan demikian, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya analisis politik, intelektual, dan kultural dalam melihat desentralisasi sebagai proses yang konstruktif dan berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih integratif dan multidimensional.

Dalam perkembangan kajian mutakhir, mulai muncul pendekatan yang menempatkan periode ini sebagai fase yang mencerminkan *resilience* atau daya lenting peradaban Islam. Konsep ini menekankan kemampuan sistem peradaban untuk beradaptasi dan bertahan di tengah perubahan struktural dan tekanan eksternal. Bukti empiris menunjukkan bahwa meskipun terjadi pergeseran pusat kekuasaan, aktivitas intelektual, ekonomi, dan sosial tetap berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Islam memiliki kapasitas internal yang memungkinkan terjadinya kontinuitas dalam kondisi yang berubah (*continuity within change*) (Simamora, 2025; Muflih et al., 2024; Mukaromah, 2020). Oleh karena itu, pendekatan *resilience* menjadi relevan untuk menjelaskan fenomena pasca-Abbasiyah secara lebih komprehensif.

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini secara eksplisit menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa kerangka interpretatif yang menempatkan desentralisasi kekuasaan sebagai mekanisme utama dalam menjaga keberlanjutan peradaban Islam di kawasan Timur pasca-Abbasiyah. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung menekankan aspek disrupsi atau kemunduran, penelitian ini mengintegrasikan dimensi politik, intelektual, dan kultural dalam satu analisis yang menekankan kesinambungan struktural. Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses desentralisasi membentuk ulang konfigurasi peradaban Islam sekaligus mempertahankan vitalitasnya dalam konteks perubahan sejarah yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan historiografi Islam yang lebih kontekstual, integratif, dan tidak reduksionis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui metode *historiographical-critical*. Fokus penelitian diarahkan pada periode pasca-Abbasiyah di kawasan Timur dengan objek kajian berupa dinamika politik, intelektual, dan kultural pada dinasti-dinasti regional. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan. Sumber dipilih dengan kriteria: memiliki relevansi langsung dengan tema penelitian, diterbitkan oleh penerbit atau jurnal bereputasi, serta diutamakan berasal dari publikasi sepuluh tahun terakhir untuk menjaga aktualitas kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu penelusuran, seleksi, dan pengelompokan sumber. Penelusuran dilakukan dengan mengidentifikasi literatur melalui basis data akademik dan referensi pustaka yang relevan. Seleksi sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian topik, kredibilitas penulis, serta kontribusi terhadap pembahasan dinasti-dinasti Islam Timur. Data yang terpilih kemudian dikelompokkan menggunakan teknik dokumentasi dengan bantuan instrumen berupa lembar kategorisasi yang memuat indikator aspek politik, intelektual, dan sosial budaya, sehingga memudahkan proses pemetaan informasi secara sistematis.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu klasifikasi, komparasi, dan interpretasi. Tahap klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan wilayah, periode, dan karakteristik masing-masing dinasti. Tahap komparasi dilakukan dengan membandingkan pola kebijakan, bentuk kekuasaan, serta kontribusi dinasti dalam menjaga keberlanjutan peradaban Islam. Tahap akhir berupa interpretasi kritis digunakan untuk menafsirkan temuan secara kontekstual dengan menempatkan desentralisasi sebagai mekanisme adaptif dalam perubahan struktur kekuasaan. Melalui tahapan ini diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pola transformasi peradaban Islam pada periode pasca-Abbasiyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil analisis historiografis, dinamika pasca-Abbasiyah di kawasan Timur menunjukkan pola perubahan yang bersifat kompleks dan tidak linear. Data yang dihimpun memperlihatkan adanya pergeseran dari sistem kekuasaan terpusat menuju bentuk distribusi otoritas di tingkat regional. Fragmentasi politik yang terjadi di berbagai wilayah diikuti dengan munculnya entitas kekuasaan baru yang memiliki kapasitas mandiri dalam mengelola pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas intelektual. Pola ini menunjukkan adanya keterkaitan antar wilayah yang tetap terjaga meskipun struktur kekuasaan tidak lagi terpusat. Untuk memberikan gambaran komparatif mengenai karakteristik masing-masing dinasti, hasil analisis disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Komparasi Dinasti Pasca-Abbasiyah di Kawasan Timur

Dinasti	Wilayah	Karakter Politik	Kontribusi Utama	Bentuk Desentralisasi
Tahiriyah	Khurasan	Semi-independen, loyal simbolik	Stabilitas administratif	Otonomi administratif
Saffariyah	Khurasan	Militeristik, ekspansif	Konsolidasi kekuasaan lokal	Desentralisasi berbasis kekuatan
Samanid	Transoxiana	Otonomi kultural	Kebangkitan ilmu & budaya	Desentralisasi intelektual
Buwaihiyyah	Baghdad	Dualistik (politik-simbolik)	Stabilitas legitimasi	Desentralisasi simbolik
Ghaznawiyah	Asia Selatan	Ekspansi terorganisir	Penguatan ekonomi & ilmu	Desentralisasi ekspansif
Salajiyah	Persia-Anatolia	Hierarkis-adaptif	Sistem pendidikan madrasah	Desentralisasi terstruktur

Tabel 1 menyajikan perbandingan karakteristik enam dinasti utama di kawasan Timur pasca-Abbasiyah. Data menunjukkan bahwa setiap dinasti memiliki corak politik yang berbeda sesuai dengan kondisi wilayah dan strategi kekuasaan yang diterapkan. Variasi tersebut terlihat pada bentuk kontribusi yang dihasilkan, mulai dari stabilitas administratif hingga pengembangan institusi pendidikan. Selain itu, bentuk desentralisasi yang muncul juga beragam, mencerminkan adanya pola adaptasi yang berbeda antar dinasti. Keseluruhan data dalam tabel ini memperlihatkan adanya keragaman struktur kekuasaan yang berkembang pada periode tersebut. Untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi secara lebih sistematis, hasil penelitian diringkas dalam bentuk pola transformasi peradaban sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Pola Transformasi Peradaban Islam Pasca-Abbasiyah

Aspek	Kondisi Sentralisasi (Abbasiyah)	Kondisi Desentralisasi	Bentuk Transformasi
Politik	Terpusat di Baghdad	Terdistribusi ke dinasti lokal	Fragmentasi adaptif
Intelektual	Terfokus di pusat	Menyebarkan ke berbagai kota	Jaringan keilmuan baru
Ekonomi	Bergantung pusat	Berkembang regional	Diversifikasi ekonomi
Budaya	Homogen dominan	Integrasi lokal	Akulturasi dinamis

Tabel 2 menggambarkan perubahan yang terjadi pada beberapa aspek utama peradaban Islam. Perbandingan antara kondisi sentralisasi dan desentralisasi menunjukkan adanya pergeseran pola dalam bidang politik, intelektual, ekonomi, dan budaya. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang sebelumnya terpusat mengalami penyebaran ke berbagai wilayah. Selain itu, munculnya variasi dalam setiap aspek menunjukkan adanya proses perubahan yang bersifat menyeluruh. Tabel ini memberikan ringkasan mengenai pola transformasi yang terjadi pada periode pasca-Abbasiyah. Untuk melengkapi gambaran mengenai kontribusi masing-masing dinasti, hasil analisis juga disajikan dalam bentuk peran dan dampak jangka panjang sebagaimana terlihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Peran Dinasti dalam Keberlanjutan Peradaban Islam

Dinasti	Peran Utama	Dampak Jangka Panjang
Tahiriyah	Konsolidasi administrasi	Model otonomi daerah
Saffariyah	Mobilisasi militer lokal	Legitimasi kekuasaan non-elit
Samanid	Patronase ilmu	Kebangkitan intelektual
Buwaihiyyah	Stabilitas simbolik	Model legitimasi dualistik
Ghaznawiyah	Ekspansi wilayah	Penyebaran Islam
Salajiyah	Institusi pendidikan	Sistem madrasah berkelanjutan

Tabel 3 menunjukkan peran utama yang dijalankan oleh masing-masing dinasti serta dampaknya dalam jangka panjang. Data memperlihatkan bahwa kontribusi yang diberikan tidak terbatas pada satu bidang tertentu, melainkan mencakup aspek administratif, militer, intelektual, dan pendidikan. Setiap dinasti memiliki karakter peran yang berbeda, yang kemudian menghasilkan dampak yang beragam terhadap perkembangan peradaban. Selain itu, keterkaitan antara peran dan dampak menunjukkan adanya kesinambungan dalam proses perkembangan tersebut. Tabel ini memberikan gambaran ringkas mengenai kontribusi dinasti dalam konteks keberlanjutan peradaban Islam.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi pada periode pasca-Abbasiyah tidak dapat direduksi sebagai indikator kemunduran, melainkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk penyesuaian struktural dalam sistem politik Islam. Pergeseran dari pola kekuasaan yang terpusat menuju distribusi otoritas di tingkat regional mencerminkan adanya mekanisme *political decentralization* yang adaptif terhadap kompleksitas wilayah dan keragaman sosial. Dalam kerangka transformasi historis, perubahan ini sejalan dengan pergeseran sistem pemerintahan dari model kolektif menuju bentuk monarki yang lebih fleksibel dalam mengelola ruang kekuasaan yang luas (Usman & bin Abdullah, 2025). Berbeda dengan pandangan yang menekankan disfungsi akibat melemahnya pusat, temuan ini justru menunjukkan bahwa kondisi tersebut membuka peluang bagi munculnya konfigurasi kekuasaan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal (Zamzam & Alawi, 2024).

Lebih lanjut, dinamika yang terjadi dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses transformasi peradaban yang bersifat berkelanjutan. Perubahan struktur kekuasaan tidak menghilangkan fondasi dasar peradaban Islam, tetapi mendorong pergeseran pusat aktivitas ke wilayah yang lebih dinamis dan produktif. Dalam perspektif *historical transformation*, kondisi ini memperlihatkan bahwa peradaban Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan identitas dasarnya. Hal ini sekaligus menguatkan argumen bahwa perubahan dalam sejarah Islam tidak selalu bergerak secara linear menuju kemunduran, melainkan sering berbentuk restrukturisasi yang menghasilkan pola sosial dan budaya baru (Sarifudin et al., 2024; Saidina, 2025). Dengan demikian, desentralisasi dapat dipahami sebagai bagian dari evolusi sistem peradaban yang berlangsung secara dinamis.

Dalam dimensi politik, relasi antara kekuasaan dan legitimasi keagamaan menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun otoritas politik berada di tangan dinasti regional, simbol keagamaan tetap dipertahankan sebagai sumber legitimasi. Fenomena ini mencerminkan adanya keseimbangan antara otoritas duniawi dan spiritual dalam praktik pemerintahan Islam. Dalam kerangka teori legitimasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan agama tidak bersifat dikotomis, melainkan saling menopang dalam menciptakan stabilitas sosial (Sudirman, 2020; Andhika et al., 2024). Dengan demikian, legitimasi keagamaan tetap berfungsi sebagai fondasi utama meskipun terjadi perubahan dalam struktur kekuasaan.

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan pada periode ini menunjukkan bahwa desentralisasi turut memperluas jaringan intelektual dalam dunia Islam. Aktivitas keilmuan tidak lagi terkonsentrasi di Baghdad, tetapi berkembang di berbagai pusat baru seperti Bukhara, Nishapur, dan Ghazni. Dukungan penguasa lokal terhadap ulama dan ilmuwan berperan dalam membentuk ekosistem keilmuan yang lebih tersebar dan produktif. Dalam perspektif *intellectual network*, kondisi ini memperlihatkan bahwa distribusi pusat keilmuan justru memperkuat dinamika produksi pengetahuan secara lebih luas. Temuan ini sekaligus

melengkapi kajian sebelumnya yang menempatkan periode klasik Islam sebagai fase penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, meskipun terjadi perubahan politik (Dani & Mansur, 2025; Mudzakkir et al., 2024).

Selain aspek intelektual, transformasi juga terjadi pada dimensi sosial dan budaya. Interaksi antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal menghasilkan bentuk peradaban yang lebih kontekstual dan beragam. Proses adaptasi tersebut tidak menghilangkan prinsip dasar ajaran Islam, tetapi memperkaya manifestasinya dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif *cultural acculturation*, kondisi ini menunjukkan bahwa peradaban Islam memiliki kemampuan integratif yang tinggi dalam merespons keberagaman budaya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam membentuk dinamika peradaban Islam (Saidina, 2025; Amin, 2024).

Dari sisi ekonomi, perubahan struktur kekuasaan juga berimplikasi pada berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru di luar wilayah inti Abbasiyah. Jalur perdagangan yang melintasi kawasan Timur menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lagi bergantung pada satu pusat, melainkan tersebar di berbagai wilayah strategis. Dalam perspektif ekonomi historis, fenomena ini mencerminkan adanya diversifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung stabilitas peradaban. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam klasik berkembang melalui pola distribusi yang tidak terpusat (Mukaromah, 2020).

Namun demikian, dinamika tersebut tidak sepenuhnya berlangsung tanpa tantangan. Konflik internal antar dinasti serta tekanan eksternal dari kekuatan luar tetap menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas peradaban Islam. Peristiwa invasi oleh kekuatan asing menunjukkan bahwa sistem yang terfragmentasi memiliki tingkat kerentanan tertentu. Meskipun demikian, tekanan tersebut tidak sepenuhnya menghentikan perkembangan peradaban, melainkan mendorong munculnya bentuk-bentuk adaptasi baru di berbagai wilayah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyoroti dampak konflik sebagai faktor yang turut membentuk perubahan struktur sosial dan politik (Basri et al., 2024; Fauzan & Setiawan, 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa periode pasca-Abbasiyah di kawasan Timur merupakan fase transformasi yang bersifat kompleks dan multidimensional. Desentralisasi tidak hanya memengaruhi aspek politik, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan intelektual, sosial, dan ekonomi secara simultan. Dalam kerangka *resilience theory*, kondisi ini menunjukkan bahwa peradaban Islam memiliki kapasitas adaptif yang tinggi dalam menghadapi perubahan struktur kekuasaan. Berbeda dengan narasi historiografi konvensional yang menekankan kemunduran, penelitian ini menegaskan bahwa periode tersebut lebih tepat dipahami sebagai fase reorganisasi yang memperluas jaringan dan memperkuat fondasi peradaban Islam (Wulandari et al., 2025; Maghfirah & Syahril, 2024). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya perspektif historiografi Islam yang lebih kontekstual dan tidak reduksionis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, periode pasca-Abbasiyah di kawasan Timur dapat dipahami sebagai fase restrukturisasi peradaban yang ditandai oleh pergeseran dari sistem kekuasaan terpusat menuju pola distribusi otoritas yang lebih luas. Melemahnya peran politik Baghdad tidak mengarah pada stagnasi, tetapi justru memunculkan pusat-pusat kekuatan baru yang mampu mengelola dinamika politik, intelektual, dan sosial secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa desentralisasi berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam menjaga

kesinambungan peradaban Islam melalui proses *adaptive restructuring*. Dalam konteks tersebut, legitimasi simbolik kekhalifahan tetap dipertahankan sebagai perekat ideologis, sementara praktik kekuasaan berkembang secara fleksibel di tingkat regional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perubahan struktur kekuasaan tidak identik dengan disintegrasi, melainkan bagian dari dinamika internal peradaban yang bersifat konstruktif.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi pemahaman historiografis dengan menempatkan periode pasca-Abbasiyah sebagai fase transformasi, bukan kemunduran sebagaimana dominan dalam narasi konvensional. Secara teoretis, temuan ini memperkuat perspektif *resilience* yang menunjukkan bahwa keberlanjutan peradaban Islam ditentukan oleh kapasitas adaptasi dalam berbagai bidang, termasuk intelektual, sosial, dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya interaksi antara nilai-nilai Islam dan konteks lokal dalam membentuk konfigurasi peradaban yang beragam dan produktif. Dengan demikian, *novelty* penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis politik, intelektual, dan kultural dalam satu kerangka interpretatif yang menekankan kesinambungan (*continuity*) alih-alih disrupsi. Implikasi konseptual dari temuan ini memberikan dasar baru dalam memahami historiografi Islam secara lebih kontekstual dan tidak reduksionis.

Ke depan, penelitian ini membuka peluang pengembangan kajian dengan memperluas cakupan wilayah maupun periode sejarah Islam yang berbeda untuk melihat variasi pola desentralisasi dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan *interdisciplinary* yang menggabungkan perspektif sejarah, politik, ekonomi, dan sosial berpotensi menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika peradaban. Selain itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi mikro yang menelaah institusi pendidikan, jaringan ulama, atau sistem ekonomi lokal guna mengidentifikasi dampak konkret desentralisasi pada tingkat masyarakat. Secara praktis, temuan ini juga dapat menjadi rujukan konseptual dalam memahami pola adaptasi peradaban di tengah perubahan global yang kompleks. Dengan pengembangan tersebut, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada ranah akademik, tetapi juga memiliki relevansi dalam membaca dinamika peradaban kontemporer melalui pendekatan *historical insight*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farouqy, A. M. (2021). Peradaban Islam pada masa dinasti-dinasti kecil di Timur Baghdad. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 9(1), 41–57. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v9i1.18664>
- Amin, S. M. (2024). *Sejarah peradaban Islam*. Amzah. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=bM0cEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kebangkitan+intelektual+dinasti+Samanid&ots=52Syo2W_St&sig=3jRpxeMb_j_HCVWsrFYIDWogLIRs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Andhika, M. R., Hamdi, S., Jailani, J., Suroto, S., Ajidan, A., & Syahputra, R. (2024). Ulama, madrasah dan legitimasi kekuasaan: Dinamika otoritas keilmuan dalam sejarah Islam. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, 1(2), 63–78. <https://journal.uinsuna.ac.id/index.php/moderation/article/view/4833>
- Ansori, F. M. (2022). Mongol invasion of Transoxiana 1219–1221 AD. *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 3(1), 17–30. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v3i1.11415>
- Basri, M., Fadillah, A. P., Juwita, F. S., & Zannah, M. (2024). Serangan Timur Lenk pada masa sejarah kemunduran peradaban Islam. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 2(1), 26–32. <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/Pendekar/article/view/559>

- Dani, P. R., & Mansur, A. (2025). Perkembangan ilmu di dunia Islam klasik (Abbasiyah). *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(1), 452–458. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.431>
- Elvan, N. A., Samad, D., & Zulheldi, Z. (2024). Sejarah pendidikan Islam dari klasik, pertengahan, dan modern. *QOUBA: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 130–140. <https://www.neliti.com/publications/588085/sejarah-pendidikan-islam-dari-klasik-pertengahan-dan-modern>
- Fauzan, E. H., & Setiawan, A. M. (2022). Lahirnya tiga kerajaan besar Islam pada abad pertengahan (1250–1800 M). *El Tarikh*, 3(1), 57–76. <https://doi.org/10.56799/jim.v4i1.6601>
- Fitriani, O. N., Mutmainnah, S., Nurjannah, O. V., & Abbas, N. (2024). Dominasi keluarga Barmaki, Buwaihi, dan Saljuki dalam dinamika politik Abbasiyah. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 2(4), 48–59. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v2i4.1232>
- Istaurina, A. (2025). Studi komparatif politik Islam: Legitimasi kekuasaan dan negara dari khilafah klasik hingga modernitas sekuler. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(1), 1–15. <https://journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur/article/view/29>
- Maghfirah, M., & Syahril, R. M. (2024). Dari pengungsian ke kejayaan: Diskursus dinasti Umayyah II dan dampak transformasinya di Andalusia pada abad pertengahan. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 3(2), 131–146. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v3i2.1611>
- Mudzakkir, A., Naro, W., & Yahdi, M. (2024). Sejarah pendidikan Islam: Karakter pendidikan Islam klasik & modern. *Indonesian Journal of Islamic Educational Review*, 1(3), 176–186. <https://doi.org/10.58230/ijier.v1i3.268>
- Muflih, M. D., Iftironi, M., Lathifah, H. N., Waraprada, S. N., Thoriq, M. A., & Fauziah, I. Y. (2024). Resiliensi konsep Islam pada Kampung Kauman Yogyakarta. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/54486>
- Mukaromah, L. A. (2020). Perkembangan ekonomi Islam era klasik (Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah). *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2). <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/4815/>
- Prasetyo, M. T. (2023). Islam dan transformasi budaya lokal di Indonesia. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 2(2), 150–162. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v2i2.1107>
- Saidina, M. F. (2025). Perkembangan peradaban Islam dalam perspektif sosial budaya. *Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial dan Multidisiplin*, 1(2), 130–143. <https://doi.org/10.64691/nizamiyah.v1i2.44>
- Sarifudin, H. A., Irsyadi, H., & Abbas, N. (2024). Transformasi peradaban dinasti Abbasiyah perspektif sejarah kebudayaan Islam. *Akhlaqul Karimah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 98–112. <https://doi.org/10.58353/jak.v3i2.222>
- Simamora, I. M. (2025). Kemajuan dan kemunduran filsafat dan sains dalam peradaban Islam: Analisis epistemologis dan sosio-politik. *Inklusi: Jurnal Pendidikan Islam dan Filsafat*, 2(1), 24–33. <https://glonus.org/index.php/inklusi/article/view/333>
- Sudirman, S. (2020). Hubungan negara dan agama dalam pandangan Islam kontemporer. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 23–38. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/649>
- Usman, Z. A., & bin Abdullah, U. (2025). Dari syura ke monarki: Perubahan sistem pemerintahan dalam sejarah politik Islam klasik. *Journal of Social Studies Research*, 3(1), 124–139. <https://doi.org/10.33059/jssr.v3i1.12615>
- Wulandari, R., Febriyanti, N., Hermalisa, H., Audiska, N., Putri, I. F., Desfika, T., & Fuadi, S. (2025). Sejarah dan peran dinasti Abbasiyyah antara tahun 750 hingga 1258 M dalam

peradaban Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(4), 134–145.

<https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i4.1373>

Zamzam, R., & Alawi, S. A. (2024). Sistem pemerintahan desentralisasi: Studi atas penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. *Shaf: Jurnal Sejarah, Pemikiran dan Tasawuf*, 1(2), 1–

12. <https://doi.org/10.59548/js.v1i2.119>